Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Vol 5 No 3 2026, p. 1132-1141
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/cendekiawan
p-ISSN: 2963-8682 || e-ISSN: 2962-7915



CENDEKIAWAN:
JURNAL PENDIDIKAN DAN STUDI KEISLAMAN
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Page 1132-1141
https://zia-research.com/index.php/cendekiawan

Integrasi Gagasan Pendidikan Islam Multikultural: Perspektif Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid

Nor Holis[1], Maisyarah[2], Ramli[3]
[1,2,3] Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan, Indonesia
Email : norholis@stai-almujtama.ac.id [1], meysarah1505@gmail.com [2], ramlisbc@gmail.com [3]

Abstrak

Artikel ini menganalisis dialektika pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid dalam merumuskan paradigma pendidikan Islam multikultural yang berakar pada fondasi teologis dan etis. Abdurrahman Wahid menegaskan humanisme kultural berbasis tradisi pesantren dan kosmopolitanisme Islam, yang memandang pluralitas sebagai arena praksis *rahmatan lil-'alamin* melalui pembelaan terhadap minoritas dan penghormatan terhadap budaya lokal. Sementara itu, Nurcholish Madjid mengembangkan rasionalitas neo-modernis yang menekankan universalitas tauhid, relativisasi klaim absolut keagamaan, serta pentingnya pembaruan pemikiran Islam dalam kerangka demokrasi dan masyarakat madani. Melalui pendekatan studi kepustakaan, kajian ini menunjukkan bahwa interaksi keduanya bersifat dialektis dan saling melengkapi: Cak Nur menyediakan legitimasi normatif-epistemologis bagi pluralisme, sedangkan Gus Dur menghadirkan dimensi praksis-kulturalnya. Sintesis tersebut melahirkan paradigma pendidikan Islam multikultural yang mengintegrasikan iman, rasionalitas, dan komitmen kemanusiaan guna membentuk insan religius yang inklusif, demokratis, dan berkeadaban dalam masyarakat majemuk.

Kata Kunci: *Abdurrahman Wahid, Multikultural, Nurcholish Madjid, Pendidikan Islam.*

Abstract

This article analyzes the dialectical interplay between the thought of Abdurrahman Wahid and Nurcholish Madjid in formulating a paradigm of multicultural Islamic education rooted in theological and ethical foundations. Abdurrahman Wahid emphasizes cultural humanism grounded in pesantren traditions and Islamic cosmopolitanism, viewing plurality as a practical arena for realizing the Islamic principle of rahmatan lil-'alamin *(a mercy to all creation) through the defense of minority rights and respect for local cultures. Meanwhile, Nurcholish Madjid develops a neo-modernist rationality that emphasizes the universality of* tawhid *(the oneness of God), the relativization of absolute religious truth claims, and the importance of renewing Islamic thought within the framework of democracy and civil society. Through a library research approach, this study demonstrates that the intellectual engagement between the two thinkers is dialectical and complementary: Cak Nur provides normative and epistemological legitimacy for pluralism, while Gus Dur articulates its practical and cultural dimensions. This synthesis gives rise to a paradigm of multicultural Islamic education that integrates faith, rationality, and a commitment to humanity in order to cultivate religious individuals who are inclusive, democratic, and civilized within a pluralistic society.*

Keywords: *Abdurrahman Wahid, Multiculturalism, Nurcholish Madjid, Islamic Education.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam multikultural saat ini menjadi sebuah urgensi dalam konteks masyarakat Indonesia yang ditandai oleh keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang sosial lain secara simultan. Kenyataan pluralitas ini menuntut sistem pendidikan Islam yang tidak hanya mentransfer pengetahuan agama secara normatif, tetapi juga mampu membentuk sikap toleran, inklusif, dan adaptif terhadap realitas multikultural di masyarakat. Pendidikan Islam multikultural dipandang sebagai wahana

strategis untuk membangun kesadaran sosial, memperkuat sikap saling menghormati, serta meredam potensi konflik yang muncul akibat perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Wahyudha & Chanifudin, 2025).

Dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia, gagasan pendidikan Islam multikultural dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Islam modernis yang memiliki perhatian besar terhadap pluralitas dan toleransi. Di antaranya adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh Islam dan negarawan yang dikenal dengan perjuangannya dalam menghormati pluralisme dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan Islam. Gus Dur menekankan bahwa pendidikan Islam harus didasarkan pada prinsip kebebasan, inklusivisme, dan multikulturalisme sebagai cara merespons keragaman sosial secara konstruktif yang sekaligus menolak tafsir eksklusif terhadap ajaran agama (Mukhlis & Syaifuddin, 2024). Sementara itu, Nurcholish Madjid, yang dikenal dengan sebutan *Cak Nur*, juga memberikan kontribusi intelektual penting terhadap pendidikan Islam kontemporer. Madjid memperluas wacana pendidikan dengan menekankan nilai-nilai pluralisme, universalitas Islam, dan keterbukaan sebagai basis pendidikan Islam yang relevan dengan realitas masyarakat majemuk. Dalam pandangan Madjid, pendidikan Islam harus mampu menginternalisasi nilai-nilai multikultural secara pluralistik sehingga peserta didik tidak hanya memahami ajaran agamanya, tetapi juga mampu merespons keberagaman budaya dan agama dengan penuh keterbukaan dan penghormatan (Mukaromah, 2020).

Beberapa studi jurnal menegaskan bahwa gagasan kedua tokoh ini memiliki relevansi yang kuat bagi pengembangan pendidikan Islam multikultural di Indonesia. Penelitian Huda dkk. menunjukkan bahwa perspektif pendidikan Islam multikultural dari Gus Dur dan Nurcholish Madjid dapat dipadukan untuk diterapkan pada pendidikan formal dan nonformal dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia (Huda dkk., 2022). Selain itu, kajian Setyazi dkk. menggarisbawahi bahwa pemikiran kedua tokoh tersebut tidak sekadar menjelaskan fakta keberagaman, tetapi memperjuangkan eksistensi dan pelestarian pluralitas sebagai landasan kualitas pendidikan Islam (Setyazi dkk., 2022).

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, artikel ini berupaya melampaui pendekatan deskriptif dan aplikatif dengan menawarkan sintesis konseptual yang bersifat filosofis-kritis. Integrasi yang dilakukan tidak hanya memadukan gagasan secara tematik, tetapi juga menelaah struktur pemikiran keduanya pada level paradigma. Artikel ini menganalisis bagaimana fondasi teologis-humanistik Abdurrahman Wahid, yang berakar pada tradisi pesantren dan kosmopolitanisme Islam, berinteraksi secara dialektis dengan rasionalitas neo-modernis Nurcholish Madjid yang berbasis pada pembaruan pemikiran Islam dan universalitas tauhid.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengintegrasikan gagasan pendidikan Islam multikultural sebagaimana dirumuskan oleh Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Integrasi ini dilakukan untuk memahami secara komprehensif bagaimana kedua tokoh dapat memberikan kontribusi terhadap teori dan praktik pendidikan Islam yang responsif terhadap keberagaman, toleran terhadap perbedaan, dan kontekstual terhadap dinamika sosial Indonesia yang plural.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis-kritis. Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakter objek kajian yang bersifat konseptual, yakni pemikiran pendidikan Islam multikultural dalam perspektif Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan pada pengukuran empiris atau evaluasi implementatif, melainkan pada analisis mendalam terhadap struktur gagasan, kerangka epistemologis, serta horizon nilai yang melandasi pemikiran tokoh (Zed, 2014).

Secara metodologis, artikel ini berupaya melampaui pendekatan deskriptif dan aplikatif yang umumnya berhenti pada pemaparan gagasan atau kemungkinan implementasinya dalam praktik pendidikan. Penelitian ini justru menempatkan integrasi pemikiran sebagai proses sintesis konseptual yang bersifat filosofis-kritis. Integrasi tersebut memadukan gagasan secara tematik seperti pluralisme, toleransi, dan inklusivisme, sekaligus menelaah struktur pemikiran keduanya pada level paradigma, yakni pada dimensi ontologis, epistemologis, serta aksiologis (Kartanegara, 2005).

Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Vol 5 No 3 2026, p. 1132-1141
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/cendekiawan
p-ISSN: 2963-8682 || e-ISSN: 2962-7915

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ringkas Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid (1940–2009) atau Gus Dur, merupakan salah satu figur sentral dalam lanskap pemikiran Islam Indonesia kontemporer. Lahir di Jombang dari keluarga ulama terkemuka—putra KH. Wahid Hasyim dan cucu KH. Hasyim Asy'ari—ia tumbuh dalam tradisi pesantren Nahdlatul Ulama (NU) yang mengintegrasikan ortodoksi fikih dengan elastisitas budaya. Tradisi ini membentuk horizon keberagamaannya yang berakar pada khazanah klasik (*turath*) sekaligus terbuka terhadap dinamika sosial-politik dan kebudayaan kontemporer (Barton, 2002).

Formasi intelektual Gus Dur semakin diperkaya melalui pengembaraan studinya di Timur Tengah, khususnya di Mesir dan Irak. Di sana ia bersentuhan dengan arus modernisme Islam, nasionalisme Arab, serta wacana demokrasi dan hak asasi manusia. Interaksi lintas budaya tersebut memperluas perspektifnya tentang Islam sebagai agama yang memiliki dimensi universal sekaligus kontekstual (Wahid, 2006).

Pergulatan Gus Dur dengan multikulturalisme menemukan momentum signifikan ketika ia memimpin PBNU (1984–1999). Dalam kapasitas tersebut, ia mendorong NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Keputusan ini, sebagaimana dianalisis oleh Greg Barton, tidak semata-mata kompromi politik, melainkan artikulasi teologis bahwa nilai-nilai Islam: keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan persamaan derajat manusia—sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, multikulturalisme dalam pandangannya berakar pada kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari *sunnatullah* yang harus direspons secara etis dan konstruktif (Barton, 2002).

Pemikiran multikultural Gus Dur terartikulasikan secara eksplisit dalam sejumlah karya pentingnya. Dalam *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (1999), ia mengkritik keras formalisasi agama yang mengarah pada kekerasan simbolik maupun fisik. Baginya, agama tidak memerlukan pembelaan melalui eksklusivisme atau klaim kebenaran yang menegasikan yang lain; justru manusia dan martabat kemanusiaanlah yang harus dibela. Sementara itu, dalam *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (2006), ia menegaskan bahwa Islam sebagai ajaran normatif bersifat universal, tetapi ekspresinya dalam sejarah bersifat plural dan kontekstual. Distingsi ini membuka ruang bagi dialog antaragama dan antarbudaya tanpa harus mengorbankan komitmen teologis.

Konsep "pribumisasi Islam" yang ia gagas menunjukkan bahwa Islam dapat berinteraksi secara kreatif dengan budaya lokal. Islam tidak hadir sebagai kekuatan homogenisasi, melainkan sebagai energi moral yang menghidupkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam konteks sosial tertentu. Perspektif ini menegaskan bahwa multikulturalisme bukanlah wacana impor, melainkan inheren dalam sejarah perkembangan Islam Nusantara yang dialogis dan akomodatif (Arif, 2015).

Komitmen Gus Dur terhadap pluralitas juga tercermin dalam praksis politiknya ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (1999–2001). Ia mencabut berbagai regulasi diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa serta mendorong dialog antaragama sebagai fondasi rekonsiliasi nasional. Kebijakan tersebut memperlihatkan konsistensi antara visi teologis dan praksis kenegaraan, sebagaimana dicatat oleh sejumlah studi tentang demokrasi dan Islam di Indonesia (Alamsyah dkk., 2022).

Dalam konteks pendidikan, gagasan Gus Dur memiliki implikasi signifikan terhadap pengembangan pendidikan Islam multikultural. Pendidikan Islam, dalam perspektifnya, tidak boleh terjebak pada reproduksi eksklusivisme identitas, melainkan harus menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Tradisi pesantren yang menghargai keragaman mazhab dan pendapat dipandangnya sebagai model autentik pendidikan Islam yang dialogis.

Secara konseptual, pemikiran Abdurrahman Wahid dapat diposisikan sebagai sintesis antara tradisi pesantren, humanisme universal, dan komitmen terhadap demokrasi. Multikulturalisme dalam pandangannya bukan relativisme teologis, melainkan afirmasi atas kesetaraan martabat manusia di hadapan Tuhan. Warisan intelektual ini menjadikan Gus Dur sebagai salah satu figur kunci dalam artikulasi Islam Indonesia yang inklusif dan transformatif.

Biografi Ringkas Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid (1939–2005), atau Cak Nur, merupakan salah satu tokoh sentral pembaruan pemikiran Islam Indonesia pada paruh akhir abad ke-20. Lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, ia tumbuh dalam tradisi pesantren yang kuat, namun sejak awal memperlihatkan orientasi intelektual yang progresif. Pendidikan formalnya ditempuh di Pondok Modern Gontor, lembaga yang menekankan

integrasi antara tradisi keislaman klasik dan wawasan modern, yang kemudian membentuk fondasi rasionalitas religius dalam pemikirannya (Moko, 2017).

Kiprah intelektualnya mulai menonjol ketika ia memimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada periode 1966–1971. Dalam pidato monumentalnya tahun 1970 tentang "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat," ia mengemukakan gagasan yang kemudian dikenal luas melalui slogan "Islam Yes, Partai Islam No." Pernyataan ini merefleksi pandangan teologisnya bahwa Islam sebagai ajaran universal tidak boleh direduksi menjadi simbol ideologis yang eksklusif. Dalam perspektif ini, Cak Nur menolak sakralisasi institusi politik atas nama agama dan menekankan substansi etis Islam sebagai nilai yang melampaui batas sektarian.

Pergulatan Cak Nur dengan multikulturalisme berakar pada pemahamannya tentang tauhid sebagai prinsip pembebasan. Baginya, tauhid tidak hanya bermakna afirmasi keesaan Tuhan, tetapi juga penolakan terhadap absolutisasi manusia, kelompok, maupun ideologi. Oleh karena itu, pluralitas dipandang sebagai konsekuensi logis dari kehendak Ilahi dalam menciptakan manusia yang beragam. Dalam buku *Islam Doktrin dan Peradaban*, ia menegaskan bahwa ekspresi Islam dalam sejarah selalu bersifat kontekstual dan berinteraksi dengan realitas sosial-budaya yang plural. Dengan demikian, pengakuan terhadap pluralisme bukanlah relativisme iman, melainkan konsistensi teologis terhadap prinsip tauhid (Madjid, 1992).

Gagasan pluralisme dan inklusivisme Islam dikembangkan lebih sistematis dalam *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Dalam karya ini, Cak Nur menunjukkan kompatibilitas Islam dengan modernitas, demokrasi, dan kehidupan masyarakat majemuk. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai seperti keadilan dan persamaan manusia memiliki landasan normatif dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, kehidupan multikultural tidak bertentangan dengan Islam, melainkan merupakan medan aktualisasi nilai-nilai universalnya (Madjid, 1987).

Melalui Yayasan Paramadina yang didirikannya, Cak Nur berupaya mewujudkan pendidikan Islam yang rasional, terbuka, dan dialogis. Pendidikan, dalam pandangannya, harus membentuk kesadaran kritis dan etos kosmopolitan yang menghargai keberagaman. Ia mendorong dialog antaragama sebagai bagian dari pembentukan *civil society* yang sehat dan demokratis. Dalam konteks ini, multikulturalisme dipahami sebagai etika kebudayaan dan kesadaran teologis yang menumbuhkan penghormatan terhadap martabat manusia (Harahap dkk., 2024).

Secara epistemologis, pemikiran Cak Nur sering dikategorikan sebagai neo-modernisme Islam, yakni usaha merekonstruksi tradisi Islam melalui pendekatan rasional-kritis tanpa memutus akar historisnya. Ia menolak dikotomi tajam antara agama dan modernitas, serta antara Islam dan demokrasi. Sikap terbuka terhadap perbedaan diposisikan sebagai tanda kedewasaan intelektual dan spiritual umat Islam. Dalam kerangka ini, pluralisme merupakan konsekuensi dari universalitas Islam yang meniscayakan dialog dan koeksistensi damai.

Gagasan Multikulturalisme Pendidikan Islam dari Kedua Tokoh

Pandangan Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan fundamental, meliputi keamanan, perlakuan yang bermartabat, akses terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kebebasan berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan berserikat yang tidak dapat dinegasikan oleh kekuasaan apa pun (Wahid, 2007). Dalam kerangka tersebut, demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem etis yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan penghargaan atas keberagaman.

Dalam perspektif Gus Dur, pendidikan Islam senantiasa berkelindan dengan dinamika sosial masyarakat. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan publik, sehingga ia harus membekali peserta didik dengan kemampuan menghadapi persoalan sosial secara kritis dan etis. Bagi Gus Dur, hakikat pendidikan adalah proses pengenalan manusia terhadap relasinya dengan Tuhan, sesama, dan alam. Pendidikan menjadi sarana pengembangan potensi dan bakat secara optimal, dengan memberi ruang kebebasan bagi peserta didik untuk mengenali diri dan lingkungannya, sembari tetap berada dalam pendampingan dan tanggung jawab moral pendidik (Adam dkk., 2025).

Relevansi pemikiran Gus Dur terhadap pendidikan Indonesia terletak pada visinya tentang sistem pendidikan yang inklusif, humanis, dan berakar pada nilai keislaman moderat serta kebangsaan. Ia menolak

model pendidikan yang dogmatis dan eksklusif, yang hanya menekankan hafalan dan simbolisme religius, tanpa pemahaman kontekstual dan sensitivitas terhadap keberagaman. Pendidikan, menurutnya, harus membentuk manusia seutuhnya: kritis secara intelektual, matang secara etis, menghargai pluralitas, dan memiliki tanggung jawab sosial (Wahid, 2006).

Kerangka ini kemudian menemukan artikulasinya dalam gagasan Gus Dur tentang pendidikan multikultural. Baginya, pluralitas bukanlah ancaman sosial, melainkan keniscayaan ontologis dalam kehidupan manusia. Prinsip *ikhtilaf al-a'immah rahmat al-ummah* (perbedaan di kalangan umat adalah rahmat) serta spirit QS al-Hujurat [49]: 13 menjadi landasan teologis bahwa perbedaan adalah sarana saling mengenal (*ta'aruf*), bukan dasar dominasi. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang sebagai ruang pembelajaran yang mengakui dan mengelola keberagaman agama, etnis, bahasa, kelas sosial, dan latar budaya, secara inklusif dan setara (Nurfitriani dkk., 2024).

Dalam perspektif Gus Dur, pendidikan multikultural tidak berhenti pada pengenalan fakta-fakta keberagaman, tetapi menanamkan etos kemanusiaan (humanisme religius) sebagai fondasi interaksi sosial. Di sinilah relevansi gagasan "Pribumisasi Islam" menjadi signifikan. Kontekstualisasi ajaran Islam dalam budaya Indonesia merupakan strategi epistemologis sekaligus kultural untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya. Agama tidak ditempatkan sebagai kekuatan hegemonik yang menundukkan budaya, dan budaya tidak pula mereduksi agama menjadi sekadar ekspresi simbolik. Sebaliknya, keduanya dipertemukan dalam dialektika yang menegaskan Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin*.

Pendidikan multikultural dalam pandangan Gus Dur bertujuan membentuk manusia ideal yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Pendidikan Islam tidak cukup menekankan transfer pengetahuan kognitif, melainkan harus mengintegrasikan dimensi afektif dan etis, mengembangkan empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta komitmen pada keadilan sosial. Demokrasi yang humanis dan pendidikan multikultural yang inklusif, dalam kerangka pemikirannya, merupakan dua sisi dari proyek peradaban yang sama: membangun masyarakat yang berkeadaban, setara, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Dalam perspektif Abdurrahman Wahid, pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam merupakan respons konstruktif terhadap realitas keberagaman sosial. Sebagai tokoh yang kerap disebut pelopor pluralisme-multikulturalisme di Indonesia, ia menegaskan bahwa pendidikan Islam harus kontekstual dan selaras dengan keragaman budaya masyarakat. Karena itu, pengembangan sekolah multikultural menuntut pembaruan metodologi dan modernisasi sistem pendidikan Islam agar lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial, termasuk dalam isu-isu simbolik-keagamaan seperti penggunaan hijab di ruang publik pendidikan (Nurfitriani dkk., 2024).

Menurutnya, implementasi pendidikan multikultural memerlukan komitmen kolektif dari pendidik, institusi pendidikan, dan perumus kebijakan agar program pembelajaran dirancang dengan pendekatan yang menghargai pluralitas. Pendidikan multikultural bukan sekadar strategi pedagogis, melainkan juga proyek etis-politik untuk menjamin hak-hak sipil seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Transformasi pendidikan harus mencakup dua ranah sekaligus: praksis pembelajaran di kelas dan reformasi kelembagaan secara menyeluruh, yang dilakukan melalui evaluasi kritis terhadap relasi kekuasaan dalam sistem pendidikan (Setyazi dkk., 2022).

Bagi Gus Dur, pendidikan multikultural mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti persaudaraan, gotong royong, solidaritas, dan saling menghormati. Di lingkungan pesantren, misalnya, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran persahabatan sosial dan tanggung jawab ekologis. Keberagaman dipandang sebagai kekayaan bangsa yang harus dikelola melalui pendekatan pendidikan yang beragam pula. Diferensiasi metode bukanlah penyimpangan dari tujuan pendidikan, melainkan strategi untuk memaksimalkan pengembangan fitrah manusia dan pembentukan akhlak yang luhur

Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural dalam pandangan Abdurrahman Wahid berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan mencegah lahirnya sikap eksklusif maupun ekstremisme. Pendidikan Islam harus menjadi ruang internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban, bukan justru legitimasi bagi tindakan intoleran.

Pandangan Nurcholish Madjid

Bagi Nurcholish Madjid, pluralitas atau multikultural merupakan konsekuensi teologis dari keesaan Tuhan. Agama, sebagai kebenaran yang bersumber dari Yang Maha Esa, memiliki dimensi

universal. Islam dalam makna generiknya, yakni sikap pasrah kepada Tuhan, dipahami sebagai substansi ajaran semua agama yang autentik. Karena itu, keesaan Tuhan berimplikasi pada kesatuan kemanusiaan, meskipun ekspresi keagamaan tetap beragam (Majid, 1995).

Dalam menghadapi modernitas, Nurcholish mendorong pembaruan pemikiran Islam melalui rasionalisasi dan modernisasi. Modern, baginya, berarti rasional, ilmiah, dan selaras dengan hukum-hukum alam. Modernisasi dipandang sebagai proses menuju kebenaran, yakni pembaruan pola pikir dan tata kerja yang tidak rasional menuju sikap yang lebih kritis dan terbuka (Majid, 1995). Di Indonesia, gagasan ini diintegrasikan dengan kerangka kebangsaan Pancasila, yang menempatkan agama-agama sebagai kekuatan moral dalam memperjuangkan keadilan, kemerdekaan, dan persatuan. Agama tidak dihapus identitasnya, tetapi dikontekstualisasikan dalam ideologi kebangsaan.

Cak Nur menegaskan bahwa Islam adalah agama terbuka yang meniscayakan sikap inklusif dalam masyarakat plural. Pluralisme bukan sekadar pengakuan atas keberagaman, melainkan kesediaan mengakui adanya kebenaran pada agama lain tanpa menanggalkan keyakinan sendiri. Sikap ini menuntut keterbukaan, toleransi, dan dialog antarkeyakinan. Ia merujuk pada konsep *al-hanifiyyah al-samhah*—agama yang lurus dan toleran—sebagai model keberagamaan yang tidak fanatik dan tidak membelenggu jiwa (Majid, 1995).

Dalam menafsirkan QS Ali Imran: 19 dan 85, Cak Nur—dengan merujuk antara lain pada tafsir Muhammad Asad—memahami "Islam" sebagai sikap kepasrahan kepada Tuhan, sehingga para nabi terdahulu pun membawa ajaran Islam dalam arti generik tersebut. Pandangan ini menegaskan bahwa seluruh agama pada dasarnya bertumpu pada prinsip tauhid dan kepasrahan kepada Yang Maha Esa (Madjid, 1992). Dengan demikian, kemajemukan agama adalah realitas sosiologis sekaligus sunnatullah yang tidak perlu disangkal, melainkan dikelola melalui dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Meski demikian, optimisme Nurcholish tentang kemungkinan "titik temu" antaragama menuai kritik, terutama terkait asumsi mayoritas-minoritas dan potensi relativisasi klaim kebenaran. Namun secara normatif, visi keberagamaannya menekankan Islam sebagai ajaran yang inklusif dan *all-inclusive*, yang menghargai kebebasan beragama serta mendorong kerja sama lintas iman demi keadilan dan kemanusiaan bersama (Ubaidillah dkk., 2020).

Sementara dalam spirit keindonesiaan Cak Nur nenekankan sikap dan cita-cita kolektif bangsa yang berlandaskan persatuan, pengembangan peradaban, serta komitmen pada Pancasila sebagai dasar negara yang final. Pancasila dipahami sebagai *common platform* yang mampu merekatkan pluralitas Indonesia, sehingga perbedaan agama, etnis, budaya, dan golongan tidak menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI selama kearifan lokal ditempatkan di atas kepentingan sektarian (Majid, 1994).

Dalam kerangka tersebut, Islam tidak perlu diformalkan sebagai ideologi negara. Yang lebih substansial adalah aktualisasi nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan kemanusiaan, dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk. Bagi Nurcholish, Indonesia adalah salah satu bangsa paling plural di dunia; karena itu, modal utama yang harus dijaga adalah persatuan dan pengalaman historis hidup dalam kemajemukan.

Konsepsi keindonesiaannya terwujud dalam gagasan *civil society* (masyarakat madani) yang menjunjung keterbukaan, keadilan, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta kesetiaan pada UUD 1945 dan Pancasila. Nilai-nilai tersebut dinilai sejalan dengan etika politik Islam. Ia menegaskan bahwa umat Islam tidak perlu menuntut pendirian negara Islam, sebab yang utama adalah substansi nilai, bukan bentuk formal negara. Negara apa pun bentuknya dapat dianggap islami apabila menegakkan nilai-nilai yang dikehendaki Tuhan, yang ditumbuhkan melalui pendekatan kultural baik dalam pendidikan, dakwah, seni, dan dinamika intelektual (Majid, 2009).

Dalam konteks pendidikan Islam, Nurcholish Madjid menilai bahwa praktik pendidikan agama Islam masih menyisakan berbagai kelemahan, terutama dalam aspek kedalaman intelektual dan keterbukaan teologis. Karena itu, ia mengusulkan pembaruan melalui: peninjauan ulang pemahaman umat terhadap ajaran Islam; kajian kritis atas sejarah pemikiran Islam sejak periode awal hingga kontemporer; telaah historis terhadap dimensi sosial, politik, dan kultural Islam; serta penguatan sumber daya ilmiah dan fasilitas riset yang memadai. Pembenahan kualitas keilmuan ini, menurutnya, harus disertai internalisasi *idea of progress*, sikap optimis, dan keterbukaan yang dipandang sebagai sikap Qur'ani karena berakar pada konsep *hanif*, yakni kecenderungan fitri manusia pada kebenaran (Majid, 1997).

Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Vol 5 No 3 2026, p. 1132-1141
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/cendekiawan
p-ISSN: 2963-8682 || e-ISSN: 2962-7915

Bagi Nurcholish, pluralisme merupakan ajaran fundamental Islam yang relevan dengan modernitas. Dengan demikian, nilai-nilai pluralisme-multikultural menjadi fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Dalam keseluruhan pemikirannya, pluralisme bukan sekadar tema tambahan, melainkan metanarasi utama dalam upaya membangun pendidikan Islam yang berkualitas, inklusif, dan berkeadaban (Syaifulloh, 2020).

Agar gagasan pluralisme-multikulturalisme Nurcholish Madjid operasional dalam kurikulum, ia perlu ditransformasikan ke dalam nilai-nilai sistemis-praktis. Nilai toleransi (tasamuh), demokrasi, keadilan (al-'adl), humanisme, egalitarianisme (al-musawah), persaudaraan (ukhuwah), dan penerimaan terhadap kearifan budaya lokal. Keseluruhan nilai tersebut dapat dijadikan fondasi ontologis dan pedagogis dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam maupun pendidikan nasional. Internalisasi nilai pluralisme-multikultural menjadi mendesak di tengah realitas kemajemukan dan ancaman intoleransi, sebagai basis pembentukan peradaban yang inklusif dan berkeadaban di masa depan (Jayana & Siswanto, 2022).

Integrasi Pemikiran Tokoh dalam Konteks Pendidikan Islam multikultural

Dialektika pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid dalam horizon pendidikan Islam multikultural memperlihatkan perjumpaan kreatif antara dua arus besar pembaruan pemikiran Islam Indonesia: tradisi pesantren yang humanistik-kultural dan rasionalitas neo-modernis yang bercorak universalistik. Keduanya bergerak dalam medan teologis yang sama yakni tauhid sebagai fondasi iman, namun mengartikulasikannya melalui jalur epistemologis dan praksis yang berbeda, sehingga interaksinya bersifat dialektis dan produktif.

Abdurrahman Wahid membangun fondasi teologis-humanistiknya dari rahim tradisi pesantren yang memadukan fikih, tasawuf, dan etika sosial. Dalam pandangannya, Islam bukan hanya sistem norma legal-formal, melainkan sumber etika pembebasan dan pembelaan terhadap martabat manusia. Tradisi pesantren yang akomodatif terhadap budaya lokal membentuk kesadaran kosmopolitan bahwa Islam historis selalu berdialog dengan realitas sosial dan kebudayaan. Dalam kerangka ini, pluralitas bukan ancaman terhadap iman, melainkan arena praksis *rahmatan lil-'alamin*. Gus Dur menegaskan bahwa pembelaan terhadap minoritas, pengakuan atas keragaman etnis dan agama, serta penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan merupakan konsekuensi teologis dari tauhid yang meniscayakan keadilan dan kesetaraan. Humanisme religiusnya berakar pada keyakinan bahwa Tuhan dimuliakan justru melalui pemuliaan terhadap manusia.

Sementara itu, Nurcholish Madjid mengartikulasikan pembaruan Islam melalui rasionalitas neo-modernis yang menekankan universalisme tauhid dan desakralisasi terhadap simbol-simbol politik keagamaan. Bagi Cak Nur, tauhid memiliki implikasi etis berupa relativisasi klaim-klaim absolut manusia; tidak ada otoritas yang mutlak selain Tuhan. Dari prinsip ini lahir gagasan pluralisme sebagai keniscayaan ilahiah sekaligus fondasi bagi masyarakat madani yang demokratis. Ia menolak eksklusivisme teologis dan mendorong ijtihad kontekstual agar Islam tetap relevan dalam masyarakat modern. Pendidikan, dalam perspektifnya, harus membentuk insan beriman yang rasional, terbuka, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan.

Interaksi dialektis antara keduanya tampak dalam tiga dimensi. Pertama, pada level ontologis, keduanya sepakat bahwa kemajemukan adalah sunnatullah. Namun jika Cak Nur menegaskan pluralitas sebagai prinsip teologis yang inheren dalam tauhid, Gus Dur menggarisbawahi dimensi historis dan kebudayaan pluralitas dalam pengalaman konkret bangsa Indonesia. Sintesis keduanya memperlihatkan bahwa multikulturalisme memiliki legitimasi normatif sekaligus relevansi empiris.

Kedua, pada level epistemologis, Cak Nur mengedepankan rasionalitas kritis dan hermeneutika kontekstual, sedangkan Gus Dur menekankan kebijaksanaan tradisi dan sensitivitas kultural. Dialektika ini mencegah tradisi menjadi stagnan dan rasionalitas menjadi terlepas dari akar spiritualnya. Pendidikan Islam, karenanya, tidak cukup hanya berbasis transmisi doktrin, tetapi harus mengintegrasikan refleksi kritis dan kepekaan sosial.

Ketiga, pada level praksis, Gus Dur menekankan pembelaan nyata terhadap kelompok rentan dan penguatan hak-hak sipil, sedangkan Cak Nur menekankan pembentukan kesadaran intelektual dan etos demokrasi. Dalam sintesisnya, pendidikan Islam multikultural bukan sekadar pengajaran toleransi, melainkan proses pembentukan karakter demokratis, empatik, dan berkeadaban.

Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Vol 5 No 3 2026, p. 1132-1141
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/cendekiawan
p-ISSN: 2963-8682 || e-ISSN: 2962-7915

Implikasi dari dialektika ini bagi pendidikan Islam multikultural adalah perlunya fondasi ganda: universalitas tauhid sebagai basis teologis kesetaraan dan humanisme kultural sebagai orientasi praksis sosial. Pendidikan Islam harus menanamkan kesadaran bahwa keimanan sejati tidak melahirkan eksklusivisme, melainkan komitmen terhadap keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, kurikulum dan pedagogi diarahkan pada pengembangan nalar kritis, keterbukaan antaragama, penghargaan terhadap kearifan lokal, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

Secara filosofis, integrasi pemikiran Gus Dur dan Cak Nur menunjukkan bahwa multikulturalisme dalam pendidikan Islam bukanlah kompromi pragmatis terhadap modernitas, melainkan artikulasi autentik dari tauhid yang berorientasi pada kemanusiaan universal. Pendidikan menjadi ruang transformasi kesadaran, dari keberagamaan yang eksklusif menuju keberagamaan yang inklusif dan transformatif, yang berakar pada iman sekaligus terbuka terhadap pluralitas dunia modern. Dialektika ini tidak hanya relevan bagi konteks Indonesia, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual bagi wacana Islam global tentang hubungan agama, demokrasi, dan kemajemukan.

CRITICAL REVIEW

Sumber arab

Sumber berbahasa Arab, khususnya Al-Qur'an, memberikan fondasi teologis bagi pendidikan multikultural. QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa keberagaman manusia merupakan realitas sosial yang mendorong proses ta'āruf (saling mengenal). Sementara itu, QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 menekankan pentingnya berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak yang berbeda keyakinan selama tidak memusuhi umat Islam.

Analisis kritis: Kedua ayat tersebut mendukung pendidikan Islam yang menghargai perbedaan dan menjunjung keadilan. Namun, nilai-nilai normatif tersebut tidak otomatis menghasilkan sikap multikultural. Diperlukan proses pedagogis melalui dialog, keteladanan, dan pengalaman belajar yang menumbuhkan empati serta sikap antidisriminasi.

Sumber Jawa

Perspektif Jawa dapat ditelaah melalui kearifan lokal, tradisi pesantren, dan gagasan pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid. Nilai seperti tepa slira (tenggang rasa), rukun (menjaga keharmonisan), dan andhap asor (rendah hati) dapat menjadi sumber etika sosial dalam pendidikan multikultural. Gus Dur memandang kebudayaan lokal sebagai ruang artikulasi ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya.

Analisis kritis: Pendekatan ini memungkinkan pendidikan Islam berdialog dengan budaya masyarakat tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Akan tetapi, kearifan lokal tidak boleh diterima secara romantis karena sebagian praktik budaya juga berpotensi mempertahankan hierarki sosial dan diskriminasi. Karena itu, tradisi lokal perlu dikaji secara kritis berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Sumber Inggris

Literatur berbahasa Inggris, seperti karya James A. Banks tentang pendidikan multikultural dan Multicultural Education: Issues and Perspectives karya James A. Banks dan Cherry A. McGee Banks, menyediakan kerangka analitis untuk mengintegrasikan keberagaman ke dalam kurikulum, pedagogi, dan budaya lembaga pendidikan.

Analisis kritis: Teori pendidikan multikultural memperkuat gagasan Gus Dur mengenai penghargaan terhadap identitas budaya serta pemikiran Cak Nur mengenai keterbukaan dan pluralisme. Namun, penerapannya dalam pendidikan Islam Indonesia harus mempertimbangkan landasan teologis, tradisi pesantren, dan konteks sosial setempat. Integrasi yang tepat bukan sekadar mengadopsi teori Barat, melainkan mendialogkannya dengan nilai-nilai Islam dan realitas kebudayaan Indonesia.

SIMPULAN

Dialektika pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid menghadirkan konstruksi konseptual yang kokoh bagi pengembangan pendidikan Islam multikultural di Indonesia. Keduanya berangkat dari fondasi teologis yang sama, tauhid sebagai pusat orientasi iman, namun

mengartikulasikannya melalui jalur epistemologis yang berbeda dan saling melengkapi. Nurcholish Madjid menegaskan universalitas tauhid sebagai landasan rasional dan normatif bagi pluralisme, demokrasi, dan masyarakat madani, sedangkan Abdurrahman Wahid mengaktualisasikan tauhid dalam praksis humanisme kultural yang membela martabat manusia, menghargai tradisi lokal, dan memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas.

Sintesis keduanya memperlihatkan bahwa multikulturalisme bukanlah adopsi eksternal dari wacana modern Barat, melainkan ekspresi autentik dari ajaran Islam yang memuliakan kemanusiaan dan mengakui kemajemukan sebagai sunnatullah. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam multikultural harus dibangun di atas dua pilar utama: pertama, kesadaran teologis bahwa keesaan Tuhan meniscayakan kesetaraan manusia; kedua, komitmen praksis untuk mewujudkan keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam ruang sosial.

Implikasinya, pendidikan Islam tidak cukup berfungsi sebagai transmisi doktrin normatif, tetapi harus menjadi ruang transformasi kesadaran yang membentuk insan beriman yang rasional, inklusif, dan berkeadaban. Integrasi antara rasionalitas neo-modernis Cak Nur dan humanisme kosmopolitan Gus Dur menegaskan bahwa religiositas yang matang adalah religiositas yang mampu berdialog, menghargai pluralitas, serta berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat demokratis yang berkeadilan. Dengan demikian, paradigma pendidikan Islam multikultural yang lahir dari dialektika keduanya memiliki relevansi strategis bagi penguatan kohesi sosial dan peradaban Indonesia yang majemuk.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel berjudul "Integrasi Gagasan Pendidikan Islam Multikultural: Perspektif Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid". Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, dosen dan civitas akademika STAI Al Mujtama Pamekasan, serta semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

REFERENSI

Adam, M. F., Munir, M., & Umro, J. (2025). PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MANHAJ KH. ABDURRAHMAN WAHID. *Tajdid*, *9*(2), 196–213. https://doi.org/10.52266/tadjid.v9i2.5097

Alamsyah, A. W., Marjono, M., Umamah, N., Sumardi, S., & Surya, R. A. (2022). President Abdurrahman Wahid's Policy Against Chinese Indonesians in 1999-2001. *JURNAL HISTORICA*, *6*(1), 64. https://doi.org/10.19184/jh.v6i1.29060

Arif, M. (2015). ISLAM, KEARIFAN LOKAL, DAN KONTEKSTUALISASI PENDIDIKAN: Kelenturan, Signifikansi, dan Implikasi Edukatifnya. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, *15*(1), 67. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i1.173

Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President*. UNSW Press.

Harahap, Q. E. F., Ginting, A. W., & Saragih, S. N. (2024). Pembaharuan Dan Modernisasi Politik Islam Di Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid (1965-2005): Menelaah Konsep Pemikiran Caknur. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6021

Huda, S., Muhammad, D. H., & Susandi, A. (2022). Konsep Pendidikan Islam Multikultural Dalam Pandangan KH. Abdurrahman Wahid Dan Nurcholish Madjid. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *4*(2), 148–156. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i2.3983

Jayana, T. A., & Siswanto, S. (2022). Penjabaran Nilai-Nilai Pluralisme Perspektif Nurcholish Madjid dalam Konteks Pendidikan Islam Multikultural. *Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *6*(1), 1–15. https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v6i1.4864

Kartanegara, M. (2005). *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Mizan Pustaka.

Madjid, N. (1987). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan.

Madjid, N. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.

Majid, N. (1994). *Pintu-pintu menuju Tuhan* (Cet. 1). Paramadina.

Majid, N. (1995). *Islam agama peradaban: Membangun makna dan relevansi doktrin Islam dalam sejarah* (Cet. 1). Paramadina.

Majid, N. (1997). *Tradisi Islam: Peran dan fungsinya dalam pembangunan di Indonesia* (Cet. 1). Paramadina.

Majid, N. (2009). *Cita-Cita politik Islam* (Cetakan kedua). Paramadina.

Moko, C. W. (2017). PLURALISME AGAMA MENURUT NURCHOLIS MADJID (1939-2005) DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, *13*(1), 61–78. https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1542

Mukaromah, S. (2020). Pemikiran Nurcholis Majid dan Pengembangan Pendidikan Islam: Analisis Spirit Keislaman dan Keindonesiaan. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, *3*(2), 123. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0301-09

Mukhlis, M. H., & Syaifuddin, M. (2024). Konsep Pendidikan Islam Prespektif KH Abdurrahman Wahid. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *4*(3), 265–272. https://doi.org/10.58737/jpled.v4i3.379

Nurfitriani, A., Nasor, M., & Basyar, S. (2024). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL ABDURRAHMAN WAHID SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, *8*(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/att.v8i1.3376

Setyazi, G., Subandi, S., & Abas, E. (2022). Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Pemikiran Nasionalis Religius; Komparasi Konsep Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, *3*(2), 191–208. https://doi.org/10.53802/fitrah.v3i2.271

Syaifulloh, A. (2020). PEMIKIRAN PENDIDIKAN NURCHOLISH MAD\JID DALAM KONTEKS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. *Iklila: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *3*(1).

Ubaidillah, A. F., Bahri, S., & Literasi Nusantara (Publisher) (Ed.). (2020). *Teologi multikultural: Tafsir tematik ayat-ayat multikulturalisme* (Cetakan I). Literasi Nusantara.

Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Wahid Institute.

Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. The Wahid Institute.

Wahyudha, R. A., & Chanifudin, C. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam. *EDU SOCIETY*, *5*(3), 1098–1106. https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2300

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor.